




# 22hukum umsida

## aldi

-  Emy Rosnawati
-  Hukum 2023-2024
-  Fakultas Hukum

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:2984156521

Submission Date

Aug 16, 2024, 9:04 AM GMT+7

Download Date

Aug 16, 2024, 9:06 AM GMT+7

File Name

late\_Karya\_Tulis\_Ilmiyah\_Mahasiswa\_UMSIDA\_Aldii\_Terbaru\_New.docx

File Size

49.5 KB

3 Pages

1,300 Words

8,637 Characters

# 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Filtered from the Report




- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

## Exclusions

- ▶ 3 Excluded Matches

---

## Top Sources

- 20%  Internet sources
- 8%  Publications
- 7%  Submitted works (Student Papers)

---

## Integrity Flags

### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 20% Internet sources
- 8% Publications
- 7% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	2%
2	Internet	pasca-umi.ac.id	2%
3	Internet	es.scribd.com	2%
4	Publication	Irwan Saputra, Thitha Meista Mulya Kusuma, Giri Sayekto, Wafrotur Rohmah, Dar...	2%
5	Internet	journal.uta45jakarta.ac.id	2%
6	Internet	initu.id	2%
7	Internet	www.kompas.com	1%
8	Publication	Eddy Wasito, Crismantoro Budisaputro. "BALON JOURNAL PENLIT, JIWA Anak TK...	1%
9	Internet	123dok.com	1%
10	Internet	clara-indonesia.com	1%
11	Internet	repository.upi.edu	1%

12	Internet	backend.hrw.org	1%
13	Internet	dilmil-denpasar.go.id	1%
14	Internet	www.suarapembaharu.com	1%
15	Internet	jump-seo.blogspot.com	1%
16	Internet	www.mongabay.co.id	1%

## The analysis of the death of a student who was shot by a police officer during a riot.

### Analisis Tewasnya Mahasiswa Yang Ditembak Oleh Anggota Kepolisian Saat Terjadi Kericuhan.

Galih Aldi Wiyogo<sup>1)</sup>, Emy Rosnawati<sup>2)</sup>.\*

<sup>1)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Korespondensi : [emyrosnawati@umsida.ac.id](mailto:emyrosnawati@umsida.ac.id)

#### I. Deskripsi Karya

Kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap demonstran, terutama mahasiswa, menjadi sorotan serius di Indonesia, terutama ketika kekerasan tersebut berujung pada kematian. Salah satu peristiwa tragis yang terpatri dalam sejarah adalah Tragedi Semanggi 1998, di mana empat mahasiswa dari Universitas Trisakti kehilangan nyawa akibat tindakan represif aparat keamanan selama demonstrasi besar yang menuntut reformasi politik.

Dalam kondisi yang penuh kericuhan dan ketegangan, cara aparat keamanan, khususnya polisi, menangani massa pengunjuk rasa menjadi sangat penting. Kesalahan dalam bertindak, seperti penggunaan peluru tajam, dapat berakibat fatal. Pendapat dari para ahli hukum, seperti Bapak Bambang Sucipto, S.H., M.Hum., memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana polisi seharusnya bertindak dalam situasi ini dan bagaimana hukum harus ditegakkan ketika terjadi pelanggaran oleh aparat. Melalui analisis kasus ini, penting untuk meninjau protap (prosedur tetap) dan aturan yang harus diikuti oleh aparat keamanan saat menghadapi unjuk rasa. Selain itu, penting juga memahami langkah-langkah hukum yang dapat diambil oleh keluarga korban untuk mencari keadilan, serta peran masyarakat dan media dalam mendukung proses ini. Kasus-kasus semacam ini menuntut adanya kebijakan dan regulasi yang jelas, serta penegakan hukum yang adil untuk mencegah insiden serupa di masa depan.

Beberapa insiden penembakan oleh aparat kepolisian terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan telah menarik perhatian publik dan menciptakan pandangan khusus terhadap penegak hukum. Media massa sering memberitakan tentang kesalahan prosedur dalam penggunaan kewenangan menembak oleh polisi. Misalnya, ada kasus di mana seorang polisi melanggar aturan dalam menjalankan kewenangan menembak, sehingga menyebabkan seseorang menjadi korban akibat kesalahan prosedur tersebut. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi penegak hukum. Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan menembak oleh aparat kepolisian harus menjadi fokus utama, agar mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Oleh karena itu, kewenangan menembak yang dimiliki oleh kepolisian perlu dihubungkan dengan perlindungan pemerintah serta penerapan hak asasi manusia, baik dari segi prosedur yang ada maupun praktiknya di lapangan.[1].

Kebijakan publik memegang peran penting dalam masyarakat bernegara, karena melalui kebijakan tersebut, kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dapat tercapai. Kebijakan publik biasanya terkait dengan peraturan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah. Lingkup kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Secara hierarkis, kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, atau lokal.[2].

## II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

### A. Apa pandangan Bapak terkait kasus tewasnya seorang mahasiswa akibat ditembak oleh polisi dalam situasi kericuhan?

Pandangan Bapak Bambang Sucipto, S.H., M.Hum. mengenai kasus tewasnya seorang mahasiswa akibat ditembak oleh polisi dalam situasi kericuhan adalah bahwa polisi tidak seharusnya menggunakan senjata api dalam penanganan unjuk rasa. Jika kericuhan dianggap berawal dari unjuk rasa, maka polisi sebagai pengaman tidak boleh menggunakan peluru tajam, melainkan harus mematuhi prosedur tetap (protap) dengan menggunakan peluru karet dan alat pengendalian massa non-mematikan. Penggunaan peluru tajam dalam situasi seperti ini, terutama terhadap mahasiswa yang tidak membawa senjata tajam, melanggar protap dan tidak dapat dibenarkan. Jika terjadi penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang pengunjung rasa, polisi yang terlibat harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, baik tindakan tersebut disengaja atau tidak[3].

### B. Bagaimana pendapat Bapak mengenai tindakan polisi dalam menangani situasi kericuhan yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa?

Bapak Bambang juga berpendapat bahwa dalam menangani situasi kericuhan yang menyebabkan kematian, polisi harus melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam untuk memastikan apakah tindakan tersebut dilakukan oleh anggotanya dan apakah itu sengaja dilakukan. Tindakan penembakan dalam kasus ini tidak dapat dianggap proporsional karena protap mengharuskan penggunaan alat yang tidak mematikan dalam menangani unjuk rasa. Keluarga korban memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum, dan polisi harus melaksanakan penyidikan yang transparan. Selain itu, kebijakan dan regulasi perlu diperbarui serta disosialisasikan dengan baik kepada aparat di lapangan agar mereka memahami dan mematuhi protap dalam menangani unjuk rasa, guna mencegah insiden serupa di masa depan.

### C. Apa pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan?

Peran masyarakat dan media sangat krusial dalam mendukung pencarian keadilan serta memastikan kasus-kasus seperti ini mendapatkan perhatian yang adil dan transparan. Bapak Bambang menekankan pentingnya agar aparat keamanan memahami dan mematuhi prosedur penanganan unjuk rasa yang ada untuk mengurangi dan mencegah kekerasan dalam penanganan demonstrasi. Sebagai contoh, Tragedi Semanggi pada tahun 1998, di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas akibat tindakan represif aparat keamanan, merupakan salah satu kasus yang relevan.[4].

Tragedi Trisakti dimulai dengan serangkaian demonstrasi mahasiswa yang terjadi akibat semakin melemahnya ekonomi Indonesia pada awal tahun 1998 karena krisis finansial Asia (Humas Trisakti, 2020). Pada pukul 12.30, mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara, tetapi aksi tersebut terhenti oleh blokade dari Polri dan militer. Beberapa mahasiswa berusaha bernegosiasi dengan pihak Polri, namun tidak membuahkan hasil. Mahasiswa akhirnya mundur, tetapi aparat keamanan justru bergerak maju dan mulai menembakkan peluru ke arah mereka, menyebabkan kepanikan. Banyak mahasiswa yang mencari perlindungan di Universitas Trisakti, namun penembakan tetap berlanjut. Akibatnya, beberapa mahasiswa terluka dan dibawa ke RS Sumber Waras. Pada pukul 20.00, dipastikan empat mahasiswa tewas akibat tembakan dan satu lainnya dalam kondisi kritis. Meski aparat keamanan membantah penggunaan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan bahwa kematian disebabkan oleh peluru tajam, yang kemungkinan merupakan pantulan dari tanah akibat tembakan peringatan. [5].

### III. SIMPULAN

Kasus tewasnya seorang mahasiswa akibat tembakan polisi dalam situasi keriuhan, seperti yang terjadi dalam Tragedi Semanggi 1998, menekankan pentingnya penegakan hukum yang ketat dan pengawasan terhadap aparat keamanan dalam menangani unjuk rasa. Menurut Bapak Bambang Sucipto, S.H., M.Hum., penggunaan peluru tajam oleh polisi dalam situasi seperti ini tidak sesuai dengan protap dan seharusnya dihindari. Polisi hanya boleh menggunakan alat pengendalian massa non-mematikan dengan terlebih dahulu memberikan peringatan. Jika penembakan terjadi dan mengakibatkan korban jiwa, meskipun tidak disengaja, aparat yang terlibat harus diproses secara hukum untuk menjamin keadilan bagi korban dan keluarganya. Bapak Bambang juga menekankan perlunya pembaruan kebijakan dan regulasi, serta peningkatan sosialisasi kepada aparat di lapangan agar mereka memahami dan mematuhi protap yang berlaku. Selain itu, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencarian keadilan dan memastikan bahwa kasus-kasus seperti ini mendapat perhatian yang layak dari penegak hukum. Secara keseluruhan, kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan memerlukan penanganan yang cermat, adil, dan transparan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Setelah laporan ini diterima, peneliti akan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual atas video **“Analisis Tewasnya Mahasiswa Karena Ditembak Oleh Anggota Kepolisian Saat Terjadi Keriuhan”** di DRPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan harapan karya ini memberi dampak positif bagi masyarakat dan almamater.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil yang tak terhingga. Cinta dan doa mereka senantiasa menjadi sumber kekuatan dan motivasi kami dalam menyelesaikan penelitian ini. Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

### REFERENSI

- [1] A. M. Andes, “Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Bentuk Tindakan Tembak Di Tempat,” *Lex Soc.*, Vol. Iv, No. 3, Mar 2016.
- [2] “Muhammad Naufal.Fisip. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.”
- [3] Fathur Rahman, : “09912454 : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana : Ilmu Hukum,” *Program Pascasarj. Fak. Huk. Univ. Islam Indones.*, 2011.
- [4] “16410134-Ta-Dewangga Nara Nandana. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta . 2020.”
- [5] K. M. A. Heriana, Q. A. Z. Efenelir, P. Widya, Y. Kharisyami, R. Nadrah, Dan D. D. Y. Tarina, “Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dan Penyebab Terjadinya Pelanggaran”.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*